

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Renewable energy directive merupakan kerangka hukum untuk pengembangan energi bersih atau terbarukan di semua sektor ekonomi Uni Eropa, yang mendukung kerja sama antara negara-negara Uni Eropa untuk mencapai tujuan ini. Sejak diperkenalkannya *Renewable energy directive* (2009/28/EC), pangsa sumber energi terbarukan dalam konsumsi energi Uni Eropa telah meningkat dari 12,5% pada tahun 2010 menjadi 23% pada tahun 2022. Swedia memiliki pangsa energi terbarukan tertinggi dalam konsumsinya (66%), di atas Finlandia (47,9%) dan Latvia (43,3%), seperti yang dilaporkan kepada Eurostat (European Commission, n.d.).

Uni Eropa sudah menjadi pemimpin global dalam energi terbarukan dalam hal pengembangan dan penyebaran teknologi. Namun, daya saingnya di pasar energi terbarukan global dapat diperkuat lebih lanjut, seperti yang dikonfirmasi oleh laporan tentang kepemimpinan global Uni Eropa dalam energi terbarukan, yang diterbitkan pada tahun 2021. Di bawah Kesepakatan Hijau Eropa, energi terbarukan adalah pilar transisi energi bersih. Energi ini memiliki biaya rendah dan diproduksi di dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan Eropa pada pemasok eksternal. Inilah sebabnya mengapa tingkat ambisi Uni Eropa untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energinya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya ditinjau kembali secara berkala (European Commission, n.d.).

Mengingat kebutuhan untuk mempercepat transisi energi bersih Uni Eropa, Petunjuk Energi Terbarukan EU/2018/2001 direvisi pada tahun 2023. Petunjuk yang diubah EU/2023/2413 mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023. Akan ada periode 18 bulan untuk mengubah sebagian besar ketentuan direktif ke dalam hukum nasional, dengan tenggat waktu yang lebih pendek pada bulan Juli 2024 untuk beberapa ketentuan yang terkait dengan perizinan energi terbarukan. Pada bulan Juli 2021, Komisi mengusulkan revisi arahan tersebut meningkatkan target 2030 menjadi 40% (naik dari 32%).

Berdasarkan arahan 2009 dan 2018, arahan yang direvisi memperkenalkan langkah-langkah yang lebih kuat untuk memastikan bahwa semua kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut dan penyerapan energi terbarukan sepenuhnya dimanfaatkan. Ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan netralitas iklim Uni Eropa pada tahun 2050 dan untuk memperkuat keamanan pasokan energi Eropa.

Selain target utama baru untuk menggandakan pangsa sumber energi terbarukan yang ada, kerangka kerja kebijakan yang kuat akan memfasilitasi elektrifikasi di berbagai sektor, dengan target spesifik sektor baru yang meningkat untuk energi terbarukan dalam pemanasan dan pendinginan, transportasi, industri, bangunan, dan pemanasan / pendinginan distrik, tetapi juga dengan kerangka kerja yang mempromosikan kendaraan listrik dan pengisian daya pintar.

Untuk mendukung penggunaan energi terbarukan dalam transportasi serta pemanasan dan pendinginan, arahan yang telah direvisi ini mengubah beberapa konsep yang diuraikan dalam integrasi sistem energi dan strategi hidrogen yang diterbitkan pada tahun 2020 ke dalam hukum Uni Eropa. Konsep-konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem energi yang hemat energi, sirkular, dan terbarukan yang memfasilitasi elektrifikasi berbasis energi terbarukan dan mempromosikan penggunaan bahan bakar terbarukan, termasuk hidrogen, di sektor-sektor seperti transportasi atau industri di mana elektrifikasi belum menjadi pilihan yang layak. Untuk sektor-sektor yang sulit dielektrifikasi ini, peraturan tersebut menetapkan target baru yang mengikat untuk bahan bakar terbarukan yang berasal dari non-biologis (European Commission, n.d.).

Sebagai hambatan penting dalam penyebaran energi terbarukan di lapangan, prosedur perizinan juga akan lebih mudah dan lebih cepat baik untuk proyek-proyek energi terbarukan (termasuk melalui periode persetujuan yang lebih pendek dan penciptaan ‘area percepatan energi terbarukan’) dan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan. Seiring dengan penghapusan bahan bakar fosil, bioenergi juga akan memiliki peran penting. Oleh karena itu, kriteria keberlanjutan diperkuat oleh arahan yang telah direvisi. Arahan Energi Terbarukan (2018/2001/EU) mulai berlaku pada bulan Desember 2018, sebagai bagian dari paket energi bersih untuk semua orang Eropa, yang bertujuan untuk mempertahankan status Uni Eropa sebagai pemimpin global dalam energi terbarukan dan, lebih luas lagi, membantunya untuk memenuhi komitmen pengurangan emisinya di bawah Perjanjian Paris (European Commission, n.d.).

Target energi terbarukan yang mengikat untuk Uni Eropa pada tahun 2030 sebesar setidaknya 40%, dengan ketentuan revisi pada tahun 2021. Target ini merupakan kelanjutan dari target 20% untuk tahun 2020. Untuk membantu negara-negara Uni Eropa memenuhi target ini, arahan tersebut memperkenalkan langkah-langkah baru untuk berbagai sektor ekonomi, terutama untuk pemanasan dan pendinginan dan transportasi, di mana kemajuannya lebih lambat (misalnya, peningkatan target 14% untuk pangsa bahan bakar terbarukan dalam transportasi pada tahun 2030). Peraturan ini juga mencakup ketentuan-ketentuan baru yang memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam pengembangan energi terbarukan dengan mengaktifkan komunitas energi terbarukan dan konsumsi energi terbarukan secara mandiri serta menetapkan kriteria yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan bioenergi (European Commission, n.d.).

Petunjuk Energi Terbarukan yang direvisi, yang diadopsi pada tahun 2023, meningkatkan target energi terbarukan Uni Eropa yang mengikat untuk tahun 2030 menjadi minimal 42,5%. Sektor energi bertanggung jawab atas lebih dari 75% emisi gas rumah kaca Uni Eropa. Oleh karena itu, meningkatkan pangsa energi terbarukan di berbagai sektor ekonomi merupakan blok bangunan utama untuk mencapai tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca bersih setidaknya 55% pada tahun 2030 dan menjadi benua yang netral iklim pada tahun 2050.

Berpedoman pada target 20% untuk tahun 2020, Petunjuk Energi Terbarukan yang diperbarui dalam 2018/2001/EU menetapkan target baru yang mengikat untuk penggunaan energi terbarukan di Uni Eropa menjadi setidaknya 40% pada tahun 2030, dengan kemungkinan revisi ke atas pada tahun 2023. Untuk mencapai ambisi iklim yang lebih tinggi seperti yang diusulkan dalam Kesepakatan Hijau Eropa pada Desember 2019, diperlukan revisi lebih lanjut atas arahan tersebut. Komisi Eropa mengusulkan target iklim baru untuk tahun 2030, termasuk perubahan Arahan Energi Terbarukan, pada 14 Juli 2021. Usulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan target dari 32% menjadi setidaknya 40% energi terbarukan dalam bauran energi UE pada tahun 2030.

Pada 18 Mei 2022, Komisi mengeluarkan rencana REPowerEU yang merumuskan serangkaian langkah untuk mengurangi ketergantungan Uni Eropa terhadap bahan bakar fosil dari Rusia sebelum tahun 2030, dengan mempercepat peralihan ke energi bersih. Rencana REPowerEU ini berfokus pada tiga aspek utama: penghematan energi, produksi energi bersih, dan diversifikasi pasokan energi di UE. Sebagai bagian dari upaya peningkatan penggunaan

energi terbarukan dalam sektor pembangkit listrik, industri, bangunan, dan transportasi, Komisi mengusulkan peningkatan target menjadi 40% pada tahun 2030 (European Commission, n.d.).

B. Rumusan Masalah

Mengapa Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable energy directiveII*?

C. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung kerangka teoritis penulis menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan judul yang penulis teliti. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah **Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**. Untuk kepemimpinan dalam organisasi atau pemerintahan, kebijakan adalah sekumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai garis besar dan dasar rencana untuk melaksanakan tugas. Istilah “kebijakan” dapat mengacu pada pemerintahan, organisasi, kelompok swasta, atau individu. Dengan melihat definisi kebijakan ini, kita dapat memahami bahwa kebijakan memainkan peran penting dalam rezim pemerintahan suatu negara agar semua tindakan dapat berjalan dengan baik dan terarah (Marbun, 2005).

Satu langkah dalam memilih dari berbagai pilihan yang ada disebut proses pengambilan kebijakan atau keputusan. Para pengambil keputusan, juga dikenal sebagai decision makers, melakukan tindakan berupa pengambilan keputusan, yang biasanya tidak terdiri dari satu keputusan. Maka keputusan yang diambil terdiri dari beberapa keputusan. Menggunakan istilah “pengambilan keputusan” dapat didefinisikan sebagai memilih alternatif terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia.

Keputusan atau kebijakan luar negeri adalah keputusan yang didasarkan pada tuntutan politik industri dan kekuatan ekonomi dan militer. Para pembuat kebijakan kemudian dipengaruhi oleh industri-faktor tersebut, yang kemudian mengubahnya menjadi kebijakan luar negeri untuk menanggapi situasi internasional. Ada empat isu yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, yaitu: 1. Keamanan nasional; 2. Kepentingan ekonomi; 3. Ideologi dan sejarah; dan 4. Metode dan praktik politik luar negeri adalah empat masalah yang memengaruhi kebijakan luar negeri (Coplin, 1992).

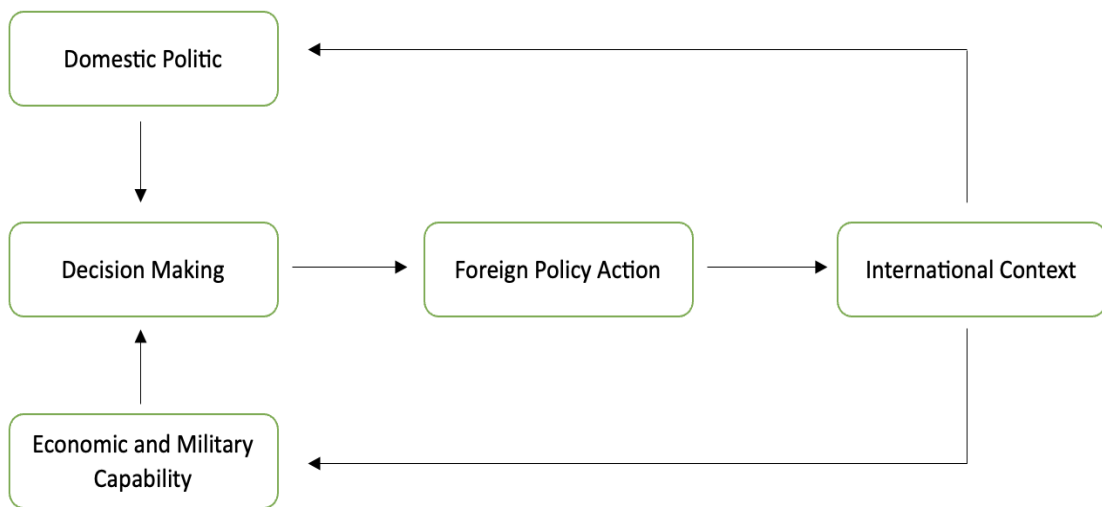
“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri, dan salah besar jika kita menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan,” menurut William D. Coplin dalam Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri. Namun, tiga pertimbangan yang memengaruhi para pengambil kebijakan internasional memengaruhi tindakan politik internasional ini:

- a. Coplin berpendapat bahwa **keadaan politik industri** suatu negara sangat memengaruhi kebijakan luar negeri. Keadaan ini menunjukkan hubungan timbal balik antara pembuat kebijakan dan industri berkepentingan. Ada empat jenis industri berkepentingan: birokrat yang mempengaruhi, partai yang mempengaruhi, kepentingan yang mempengaruhi, dan massa yang mempengaruhi. Dalam hubungan timbal balik ini, para influencer akan menyuarakan kepentingan mereka kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka dapat membuat kebijakan yang bermanfaat bagi mereka. Sementara itu, manfaat bagi industri berkepentingan kepada pembuat kebijakan adalah industri sebuah kebijakan dibuat dan mendapat respons yang baik dari para influencer, negara tersebut dianggap berhasil.
- b. **Perekonomian dan militer** bekerja sama untuk menunjukkan kekuatan dan alat untuk memperkuat kebijakan luar negeri negara. Kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa sangat penting untuk ekonomi. Untuk mengetahui seberapa besar kapasitas produksi suatu negara, para ahli dapat menghitung Gross National Product (GNP). GNP juga dapat digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mengukur nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama satu tahun. Selain itu, GNP juga dapat digunakan untuk menghitung kemakmuran penduduk suatu negara dan membandingkannya dengan negara lain. Namun, meskipun sebuah negara memiliki kekuatan militer yang kuat, mereka hanya dapat menggunakan peralatan perang yang biasa, dan sebaliknya.
- c. Menurut Coplin, ada tiga komponen penting dari **konteks internasional**: geografis, ekonomi, dan politis. Semua ini dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

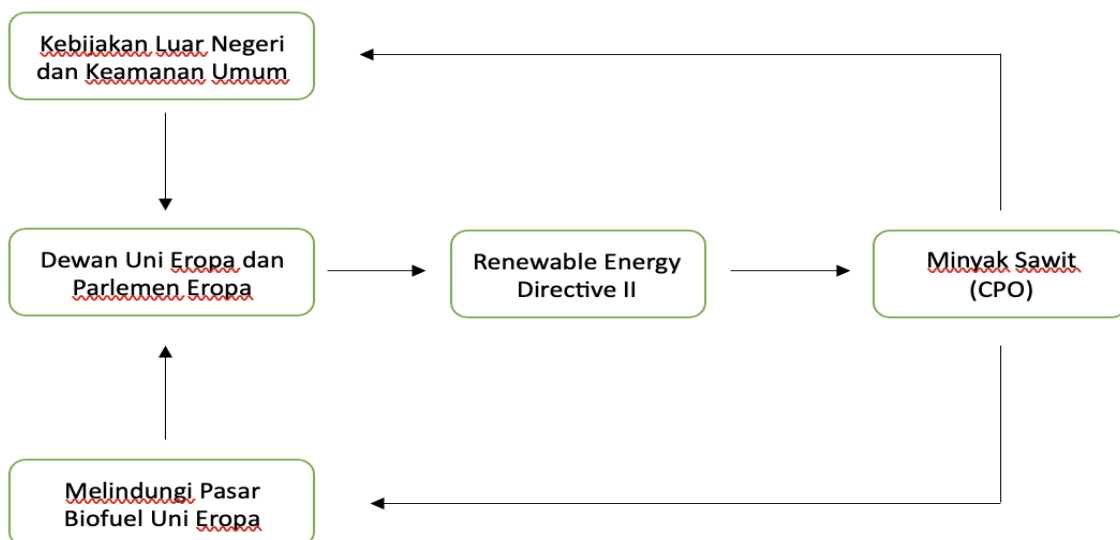
Pengambilan kebijakan luar negeri dapat dijelaskan melalui teori decision making process oleh William D. Coplin. William D. Coplin merumuskan beberapa industri penting yang dapat membantu menjelaskan mengapa pemerintah membuat kebijakan tertentu, seperti situasi politik industri, kemampuan ekonomi dan militer negara, dan konteks internasional. Teori Coplin juga menggambarkan dinamika dari konsep pembuatan keputusan sebelum

menghasilkan kebijakan politik luar negeri yang kemudian menjadi tindakan negara (Coplin, 1992).

Dalam penelitian ini pengambilan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Uni Eropa adalah kebijakan RED II, keluarnya kebijakan RED II bertujuan untuk mengurangi penggunaan biofuel yang berpotensi merusak lingkungan dan Uni Eropa juga membatasi masuknya produk impor serta mengantisipasi ketergantungan energi.



Gambar 1: Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri



Gambar 2: Implementasi Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah ini, diperoleh alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Renewable energy directive II terhadap minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil*) dikarenakan adanya kepentingan ekonomi dalam melindungi pasar industri minyak nabati yang di produksi oleh Uni Eropa.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II terhadap impor minyak sawit dan mengetahui kepentingan Uni Eropa dalam kebijakan Renewable energy directive II.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk memahami tema yang diangkat dalam pembahasan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II terhadap impor kelapa sawit. Pada tahap pengumpulan data, penulis dapat melakukan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, situs resmi dan lain-lain.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi fokus pembahasan dalam penelitian ini agar tetap sejalan dengan judul yang telah disajikan, maka Penulis menganalisis mengenai alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II terhadap impor kelapa sawit khususnya pada tahun 2016-2023. Penulis memfokuskan industri waktu pada tahun 2016-2023 karena pada tahun tersebut terdapat isu tentang kebijakan dan alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II terhadap impor minyak kelapa sawit.

H. Rencana Sistematika Penelitian

Sebuah penelitian harus ditulis secara sistematis, hal itu merupakan salah satu syarat yang mutlak dalam kaidah penulisan yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu penulisan hasil dari sebuah penelitian akan terlihat baik apabila disajikan menggunakan cara yang sistematis. Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan penelitian yang berbentuk paper ini, sebagai berikut:

Bab I: Berisikan mengenai uraian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Membahas tentang perkembangan minyak nabati yang terdapat di Uni Eropa, Uni Eropa memproduksi minyak *rapeseed*, minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari.

Bab III: Membahas tentang alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable energy directive II* terhadap impor minyak nabati kelapa sawit adanya kepentingan ekonomi untuk melindungi pasar industri Uni Eropa.

Bab IV: Pada bab terakhir, penulis menyimpulkan hasil analisis tentang alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *Renewable energy directive II* terhadap impor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil).